RENCANA AKSI 2023

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN

KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK (Balai Gakkum) Wilayah Kalimantan tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana Aksi ini memuat perencanaan dan prognosis per Triwulan di Tahun 2023 lingkup Program Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan yang berlandaskan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2023, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah di tetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan Rencana Aksi ini diharapkan adanya optimalisasi peran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan di dalam peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pada tahun-tahun selanjutnya.

Kepala Balai,

Eduward Hutapea, S.Si

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Aksi (Renaksi) Tahunan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum) Wilayah Kalimantan Tahun 2023 adalah dokumen yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja TA 2023 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan.

B. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tetang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Balai Pengaman dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Gakkum Kalimantan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan memiliki sumber daya manusia, adapun sumber daya manusia yang dimiliki tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Data Terpilah Sumber Daya Manusia Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan. Data SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan per 8 Agustus 2022 berjumlah 214 orang yang terdiri dari 188 ASN, 24 PPNPN dan 2 Tenaga Kontrak, dengan komposisi pemilahan data berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia seperti tabel dibawah ini:

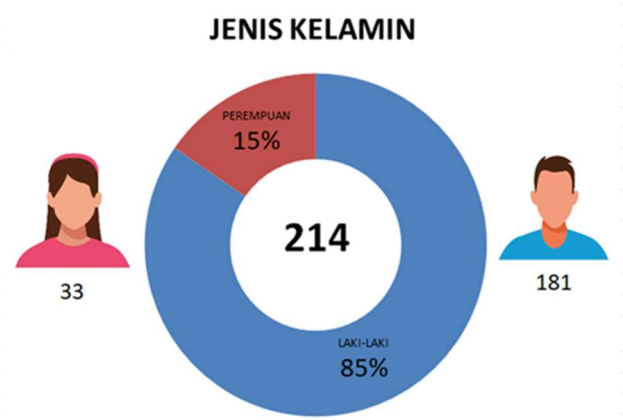

Gambar 2. Data Terpilah berdasar jenis kelamin

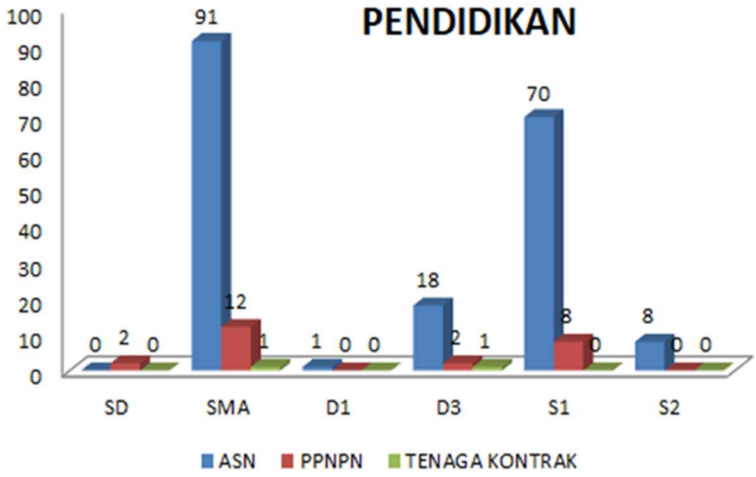

Gambar 3. Data Terpilah berdasarkan pendidikan

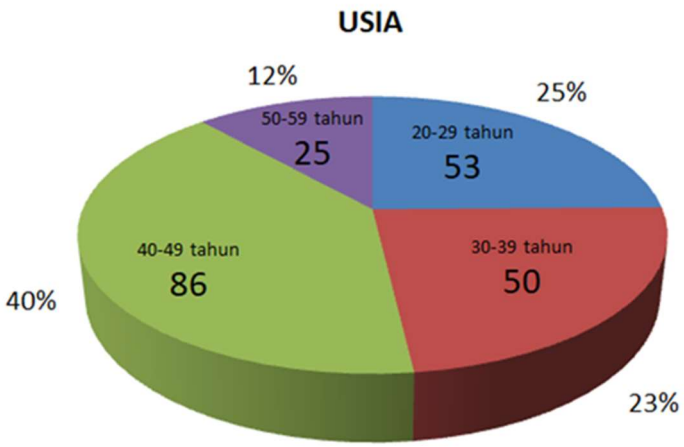

Gambar 4. Data Terpilah berdasarkan usia

D. PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan, dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan semua pihak dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dan pembangunan.

Komitmen Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan terhadap pencapaian PUG lebih lanjut diterjemahkan melalui Roadmap Pengarusutamaan Gender Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan yang menngacu pada Roadmap Ditjen Gakkum LHK Nomor P.2/PHLHK/Setjen/SET.1/5/2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Kelembagaan PUG menjadi salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam implementasi PUG yang ditandai dengan adanya kelompok kerja (POKJA), *Gender focal point* dan *Gender Champion* di Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan.

Komitmen Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan di tahun 2023 terhadap pencapaian PUG lebih lanjut diterjemahkan melalui Road Map Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, sebagai berikut :

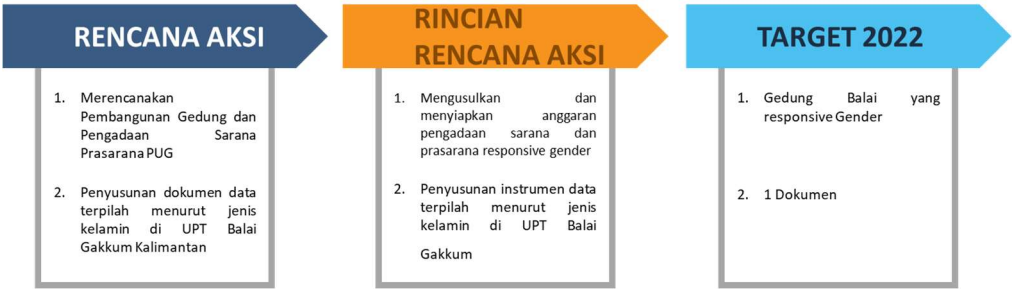

Gambar 5. Road Map Balai Gakkum Kalimantan Tahun 2023

BAB II
RENCANA AKSI

Sesuai dengan perjanjian kerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan TA 2023, telah disampaikan bahwa kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan adalah tersedianya instrumen dan regulasi untuk mendukung kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit pelaksana teknis Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari Indikator Kinerja K Balai Gakkum Kalimantan yang merupakan bagian dari sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tabel berikut:

Table 1. Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Satuan
Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah Operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	18	Operasi
	Jumlah Operasi Pembalakan Liar	5	Operasi
	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	15	Orang
Pencegahan dan Pengamanan Hutan Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap perundang-undangan bidang LHK	134	Perusahaan
	Jumlah PPLH yang	10	Orang

terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	ditingkatkan kapasitasnya		
Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai P-21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	38	Perkara
	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	5	Orang
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Ditjen Penegakan Hukum LHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen satuan kerja	1	Layanan

BAB III PENUTUP

Tercapainya indikator kerja kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan didukung oleh kontribusi penuh dari para pelaksana di unit pelaksana teknis lingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Oleh karena itu, rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan serta semua pemangku kepentingan dalam upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan akibat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Dengan disusunnya rencana aksi ini dapat mendorong penyelenggaraan program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan lingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat diharapkan agar tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.

BAB IV

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TABEL 1 PROGNOSIS CAPAIAN KEGIATAN PER TRIWULAN BALAI GAKKUM KLHK TA 2023;

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target 2023	Satuan
Layanan Perkantoran	-	-	-	1	1	Layanan
Layanan Dukungan Manajemen Satker UPT	-	-	-	1	1	Layanan
Operasi Pengamanan Hutan dan Penindakan Perusakan Lingkungan Hidup	4	4	6	4	18	Operasi
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	1	1	2	1	5	Operasi
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	-	-	15	-	15	Orang
Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	33	35	33	33	134	Perusahaan
Peningkatan Kapasitas PPLH	-	-	5	-	10	Orang
Kasus Tindak Pidana LHK P21	9	10	10	9	38	Perkara
Peningkatan Kapasitas PPNS	-	-	-	5	5	Orang

TABEL 2 PROGNOSIS CAPAIAN KEGIATAN PER BULAN BALAI GAKKUM KLHK TA 2023;

Indikator Kinerja Program	Bulan Ke-*												Satuan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Layanan Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Layanan
Layanan Dukungan Manajemen Satker UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Layanan
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	-	Operasi
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	Operasi
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	Orang
Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	11	11	11	8	14	13	11	11	13	15	15	5	Perusahaan
Peningkatan Kapasitas PPLH	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	Orang
Kasus Tindak Pidana LHK P21	3	3	3	2	4	4	4	3	3	4	3	2	Perkara

Peningkatan Kapasitas PPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	Orang

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK
Wilayah Kalimantan

2023

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK
Wilayah Kalimantan
2023